

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

2.1 Sejarah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pemalang dibentuk untuk mengelola pendapatan daerah secara lebih terstruktur, profesional, dan efektif. Pembentukan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, fungsi pengelolaan pendapatan daerah belum berdiri secara mandiri dan masih tergabung dalam instansi lain. Sebagai perangkat daerah yang berwenang, BAPENDA bertugas mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi, dan pendapatan sah lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mampu mendukung pembangunan daerah secara mandiri.

Dalam mendukung tugas tersebut, BAPENDA Pemalang terus berinovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, salah satunya dengan menerapkan e-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Sistem ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pelaporan serta pembayaran pajak, termasuk pajak restoran yang merupakan salah satu penyumbang penting PAD. Selain itu, BAPENDA juga memperluas akses layanan pajak melalui kanal seperti Samsat Keliling dan Samsat Malam.

Namun, implementasi sistem digital ini masih menghadapi berbagai kendala, baik teknis maupun administratif, yang berdampak pada efektivitas pelaporan dan realisasi pendapatan pajak daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.

2.2 Lokasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Kantor kabupaten Pengelolaan pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Jl. Suro Hadikusumo No.1, Kebondalem, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52312;

Telepon : (0284)324585/324584

Email : bapenda.pml@gmail.com

Website : <https://bapenda.pemalangkab.go.id>

2.3 Tujuan Didirikan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Tujuan didirikannya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Pemalang adalah untuk mengelola,meningkatkan,dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Bapenda bertugas membantu pemerintah Daerah dalam memastikan sumber sumber pendapatan seperti pajak daerah dan retribusi, dikelola secara efektif dan transparan guna mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.

2.4 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mendukung visi dan misi kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Pemalang yaitu sebagai berikut:

a. Visi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Daerah Melalui Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Yang Transparan, Amanah dan Profesional.

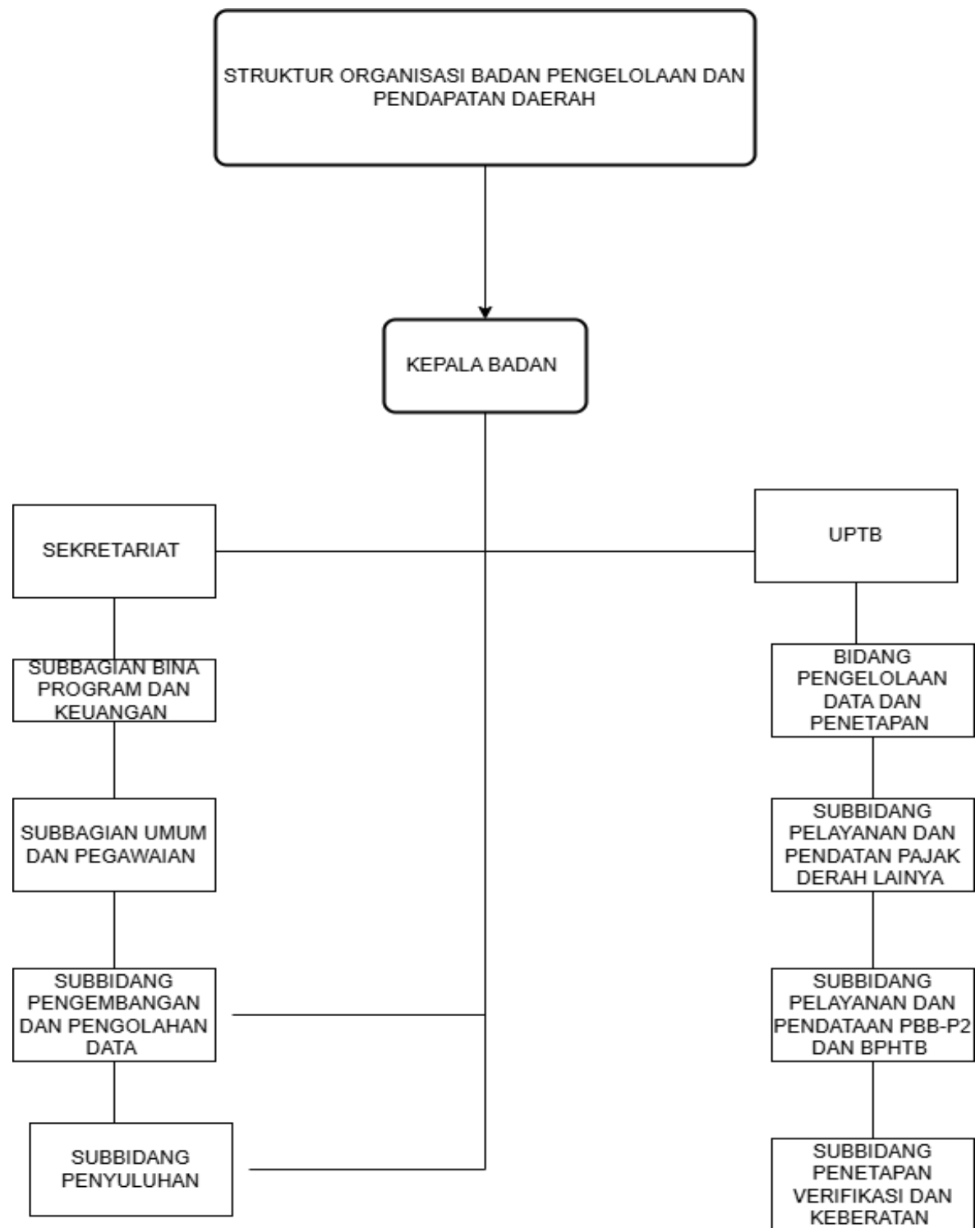
b. Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

1. Meningkatkan Transparansi, Inovasi dan Kualitas pelayanan pengelolaan pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan sinergi seluruh stakeholder pengelolaan pendapatan Asli Daerah
3. Meningkatkan Profesionalisme sumber Daya Apratur di Bidang Pendapatan Asli Daerah
4. Meningkatkan Akurasi Basis Data dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

5. Menciptakan Layanan Pemungutan Pajak Yang Transparan, *Akuntable*, Murah, Sederhana dan Ramah.

2.5 Kedudukan, Tugas Pokok Badan Pengelaaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara struktural, Bapenda berada di bawah koordinasi Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan ketentuan organisasi pemerintahan daerah. Sebagai pelaksana teknis di bidang pendapatan, Bapenda memiliki tanggung jawab dalam membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan fungsi penunjang keuangan. Peran ini meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan yang berhubungan langsung dengan penerimaan pendapatan daerah. Fungsi utama Bapenda antara lain adalah menyusun kebijakan teknis terkait pengelolaan pendapatan, mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja dan Anggaran (Renja), serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data objek dan subjek pajak tercatat dengan baik, sebagai dasar penghitungan dan penetapan pajak yang akurat. Melalui fungsi ini, diharapkan penerimaan PAD dapat dioptimalkan secara efisien dan akuntabel, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BAPENDA

Sumber : BAPENDA, Pemasang

2.6 Keadaan Personalia Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Pemalang

Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sebanyak 49 orang. Dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan data Pendidikan pegawai sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Data Pegawai BAPENDA

No	Pendidikan Formal	Jumlah
1	Pasca sarjana (S2)	8
2	Sarjana (S1)	14
3	Diploma III	3
4	Diploma I	1
	Sekolah Menengah Atas (SMA)	22
Total		49

Sumber : BAPENDA, Pemalang

2.7 Deskripsi Jabatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Pemalang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 mengenai “kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang” dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kepala Bapenda

Kepala Bapenda adalah pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan seluruh kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

Tugas Utama:

1. Menyusun dan menetapkan Renstra dan Renja sesuai RKPD dan RPJMD.
2. Merumuskan RKA dan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
3. Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.
4. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran.
5. Menetapkan SKPD dan menangani permohonan keberatan pajak.
6. Menyusun laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban tugas.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai arahan pimpinan.

b. Sekertaris Bapenda

Sekretaris Bapenda mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mengoordinasikan program serta anggaran kesekretariatan.
2. Menyusun kebijakan dan inovasi untuk mendukung kelancaran tugas.
3. Menyelenggarakan kegiatan subbagian sesuai DPA.
4. Mengelola informasi publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
5. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
6. Mengevaluasi pelaksanaan program dan menyusun laporan.
7. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan.

c. Bidang Perencanaan Pendapatan

Bidang perencanaan pendapatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan menyusun kebijakan teknis perencanaan pendapatan
2. Mengelola data potensi dan rencana pendapatan daerah.
3. Melakukan sosialisasi dan pembinaan wajib pajak.
4. Menyusun laporan piutang dan inovasi bidang.
5. Mengevaluasi serta berkoordinasi lintas unit kerja.
6. Melaksanakan tugas tambahan pimpinan.

d. Bidang Pendapatan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai urusan tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan menyusun kebijakan teknis pendataan dan penetapan.
2. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak.
3. Memverifikasi dokumen pajak dan SKPD.
4. Menyusun inovasi dan laporan pelaksanaan tugas.
5. Mengevaluasi kinerja bidang.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

e. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan keberatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan dan menyusun kebijakan teknis penagihan dan keberatan pajak.

2. Melaksanakan pelelangan aset dan penagihan piutang pajak.
3. Memverifikasi STPD dan permohonan angsuran/restitusi pajak.
4. Melakukan pembinaan wajib pajak dan inovasi pelayanan.
5. Menyusun laporan dan mengevaluasi program.

Melaksanakan tugas tambahan dari pimpinan